

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Andi Setiawan, dkk., Pengantar *State Auxiliary Agency*, (Malang: UB Press, 2015).
- Andreae, Fockerma, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, (Jakarta: Binacipta, 1983).
- Arifin, Firmansyah, *ed. al.* Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Cetakan ke - 1, (Jakarta: KRHN, 2005).
- Arikuntoro, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002).
- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- _____, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, cet. 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- _____, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Attamimi, A. Hamid S., dalam disertasi Doktor berjudul Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Mengatur Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990).
- Basarah, Ahmad, Kajian Teoritis terhadap *Auxiliary State's Organ* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43 No. 1, Januari 2014.
- Busroh, Abu Daud, Ilmu Negara, Cetakan ke - 4, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 145-146.
- El-Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2005).

- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: P.T. Alumni, 2010).
- Huda, Ni'Matul, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- _____, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 197. Lihat juga: Andi Setiawan, dkk., Pengantar *State Auxiliary Agency*, (Malang: UB Press, 2015), h. 3. Lihat juga: Lukman Hakim, Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, (Malang: Program Pasca UB, 2010).
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif – Cetakan Ke - 1, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014. (Jakarta: Komnas HAM, 2010).
- Lay, Cornelis, *State Auxiliary Agencies*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 12, April-Juni 2006.
- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 – Buku II: Sendi-sendi/Fundamen Negara (Edisi Revisi), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010).
- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 – Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama (Edisi Revisi), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010).
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi - Cetakan IV, (Bandung: Alumni, 1987).
- Nasution, S., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2002),
- Pranarka, A. M. W., Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, Cetakan Pertama, (Jakarta, CSIS, 1985).
- Pratikno, Cornelis Lay dkk., Komnas HAM 1993-1997: Pergulatan dalam Otoritarianisme, (Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2002).
- Pringgodigdo, A.G., Perubahan Kabinet Presiensil Menjadi Kabinet Parlementer, (Yogyakarta: Yayasan Fonds UGM, Tanpa Tahun).

- Schein, Edgar H., Psikologi Organisasi, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1991).
- Soekanto, Soerjono, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, (Jakarta: Penerbit Alumni, 1983).
- _____, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2014).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soemitro, Roni Hanitjo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Sriyana, Peran Komnas HAM dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI yang diselenggarakan ELSAM pada 18 Juni 2007, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Thohari, A. Ahsin, Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jentera Jurnal Hukum: Komisi Negara, Edisi 12 tahun III, April-Juni 2006, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006).
- Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Yudhawiranata, Agung, *ed. al.* Komnas HAM dan Prinsip-Prinsip Paris, Sebuah Gugatan (Jakarta: Elsam, 2001).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.

Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

C. Website

BBC Indonesia, 15 Juli 2013, “Dokumen Magna Carta akan Dipamerkan”, diakses dari: http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/07/130715_magna_carta_dipamerkan, pada tanggal 7 Maret 2018.

Komnas HAM, Tentang Komnas HAM, Online, diakses dari: <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>, pada tanggal 12 November 2018

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia, Online, diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, pada tanggal 11 November 2018.

Tempo.co, “9 Kasus HAM Masa Lalu, Komnas HAM Minta Kejagung Segera Bertindak”, tanggal 23 Februari 2018, online, diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/1063616/9-kasus-ham-masa-lalu-komnas-ham-minta-kejagung-segera-bertindak>, pada tanggal 25 Mei 2018.